ISI (CONTENT)

1.	Uji Adaptasi Varietas Unggul Baru Padi Sawah Berbasis Pendekatan Pengelolaan Tanam Terpadu di Sumatera Barat (<i>Test Adaptation of Superior New Variety Rice Based on Approach Integrated Crop Management in West Sumatra</i>) Atman.....	74
2.	Pemanfaatan Limbah Serat yang Disuplementasi dengan Mineral Kromium Sebagai Media Pertumbuhan Fungi <i>Ganoderma lucidum</i> (<i>Utilization of Mineral Fibre Supplemented With Chromium Waste As a Growth Media Ganoderma Lucidum</i>) Fauzia Agustin.....	81
3.	Pengembangan Padi Merah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani (<i>Development of Red Rice In Order to Increase of Farmers</i>) Etti Swasti dan Nurwanita Ekasari Putri.....	90
4.	Pengujian Formula Agensia Hayati <i>Bacillus Sp.</i> dan <i>Pseudomonad</i> Fluoresen Untuk Mengendalikan Penyakit Layu Bakteri Nilam (<i>The assessment of Bacillus sp. and Pseudomonad Fluorescen Biological Control Agent Formulation to Control Patchouli Wilt Disease</i>) Chrisnawati.....	99
5.	Perbedaan Kebutuhan Fosfor dan Kualitas Benih Kedelai Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau (Studi Kasus Produksi Benih Kedelai Label Biru) (<i>Different of Phosphoric Needs and Soybean Seed Quality the Rainy Season and Dry Season (Case Study Soybean Seed Production of Blue Label)</i>) Rudi Hartawan.....	108
6.	Studi Penguasaan Tanah dan Pohon Untuk Memperbaiki Pengelolaan Agroforestri di Sumatera Barat (<i>The Land and Tree Tenure Study to Improve Management of Agroforestry in West Sumatera</i>) Tri Martial.....	119
7.	Produksi Beberapa Genotipe Cabai dan Ketahanannya Terhadap Penyakit <i>Phytophthora</i> (<i>Yield of Several Chili Genotypes and Its Restance to Phytophthora</i>) Nurwanita Ekasari Putri, Sriani Sujiprihati, M. Syukur dan Widodo.....	132
8.	Identifikasi Pertumbuhan Itik Lokal Sumatera Barat (Pitalah, Kamang dan Bayang) Periode Grower (<i>Identification local duck growth in West Sumatera : Pitalah, Kamang and Bayang in grower period</i>) Zasmeli Suhaemi.....	141

PENERBIT

Program Studi Agroteknologi dan Peternakan
Fakultas Pertanian Universitas Tamansiswa

Studi Penguasaan Tanah dan Pohon Untuk Memperbaiki Pengelolaan Agroforestri di Sumatera Barat

(The Land and Tree Tenure Study to Improve Management of Agroforestry in West Sumatera)

oleh:
Tri Martial¹⁾

¹⁾Department of Agriculture, Islamic University of North Sumatera (UISU).

ABSTRACT

Planting trees on public lands are often considered unsustainable due to the rights of individuals are weak. Therefore it is important to know the individuals tree rights to promote tree planting. The study aims to conceptualize tree tenure system to encourage better management of agro forestry at the farm level. The result showed variation on tree tenure rights can be separated from land tenure rights, but attached to a custom or habit which is a local setting (customary). So tree tenure security is not determined by the status of land. Communal basis emphasize communal rights as the basis to use trees. Traditional management initiatives of agro forestry illustrate that the land use pattern support sustainability in term of activities on land and environmental conservation. Communal restrictions to use of trees by land's holder encourage them choose the non-timber type of plants for revenue purposes.

Key words: Agroforestry, communal, land tenure, tree tenure, West Sumatera

PENDAHULUAN

Agroforestri merupakan suatu penggabungan tanaman pohon dan tanaman pertanian lain dalam satu kesatuan sering dipromosikan sebagai sistem yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan. Namun sistem ini pula dikenali sebagai bentuk tradisional yang umumnya dipraktekkan di lingkungan pedesaan. Sifat agroforestri yang tradisional seringkali mengarahkan sistem ini kepada bentuk apa adanya dengan input-input ke lahan secara minimal.

Di Sumatera Barat agroforestri telah dikenal secara luas sejak lampau dalam bentuk 'parak' (tanah berhutan). Agroforestri umumnya ditemui pada tanah-tanah masyarakat khususnya pada

tanah kering dalam bentuk ladang atau kebun. Agroforestri potensial untuk dikembangkan sebab dinilai sebagai sistem *land use* yang tepat untuk mengatasi masalah kerusakan lahan dengan melakukan penanaman pohon pada tanah pertanian. Di Sumatera Barat sebagian besar tanah berhutan (*parak*) merupakan tanah ulayat dan tidak bersertifikat. Tanah ulayat menurut Van Dijk (dalam Syahyuti, 2006) adalah hak atas tanah adat berupa hak persekutuan atau pertuanan. Tanah umumnya merupakan kepemilikan komunal kaum/suku, dimana pemegang tanah mendapatkan hak untuk mengelola tanah (*ganggam bauntuak*) memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari oleh pemegang tanah.

Agroforestri merupakan sistem pertanian campuran dengan tanaman pohon membutuhkan jaminan pemilikan dalam jangka panjang untuk mencapai keberlanjutannya. Penguasaan terhadap tanah dan pohon menghasilkan jaminan bagi petani untuk dapat memungut hasil, menjadi syarat utama terhadap adopsi dan investasi pada tanah. Dengan kata lain petani akan mengusahaan agroforestri ini dalam bentuk investasi pohon jika diprediksi terdapat jaminan untuk memanennya nanti atau terdapat jaminan penguasaan tanah dan pohon.

Jaminan keamanan penguasaan inilah yang dapat mendorong pengelolaan agroforestri menjadi lebih baik sehubungan dengan input-input ke lahan maupun perlakuan-perlakuan budidaya yang lebih menguntungkan petani sebagai pengelola lahan. Oleh sebab itu dalam tulisan ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana konsep penguasaan tanah dan pohon pada agroforestri di Sumatera Barat sehingga mampu memperbaiki sistem pengelolaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Sumatera Barat. Lokasi penelitian adalah areal *parak* yang merupakan integrasi pohon dan tanaman pertanian. Areal dipilih secara *purposive*, dengan kategori terdapat pola pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri atau dalam pengertian di Sumatera Barat sebagai '*parak*' yang didominasi oleh tanaman tahunan atau pohon dalam suatu bentang lahan.

Berdasar kategori di atas ditentukan tiga lokasi nagari (desa), yaitu: 1. Nagari Paninggahan, terletak di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penggunaan lahan didominasi oleh tegal/ kebun dan hutan dalam bentuk agroforestri berbasis

tanaman perkebunan (PBAF/ *plantation based agroforestry*) yang mencapai 56 persen lebih di areal Paninggahan. Tanaman perkebunan yang menempati porsi tertinggi adalah kopi robusta, kelapa, cengkch, kemiri, kasiavera dan coklat. 2. Nagari Koto Malintang, terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Parak yang berada di sebelah atas desa berupa campuran vegetasi yang didominasi durian dan kasiavera, serta tanaman tahunan lainnya dalam suatu bentang lahan yang kompak (MPTS/ *multipurposed tree species*). 3. Nagari Paru, terletak di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Parak merupakan kebun-kebun penduduk yang didominasi oleh karet dan kasiavera dalam hamparan yang luas mengelilingi Nagari Paru (RBAF/ *Rubber based agroforestry*).

Observasi dilakukan dengan menilai dan menggambarkan pola-pola kelembagaan lahan (*land tenure*) pada lahan komunal dan dinamika yang terjadi pada variabel kelembagaan lahan yaitu kepemilikan, akses atau pemanfaatan, dan manajemen atau kontrol pada lahan. Pendekatan ini mengacu kepada '*Rapid appraisal social forestry for land and tree tenure*' dalam menentukan *land* dan *tree tenure* (FAO, 2000).

Data primer didapat dari wawancara dan kuesioner dengan petani responden, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu walinagari, ketua-ketua adat, dan ketua organisasi, sedang data sekunder berupa gambaran fisik wilayah setempat dari instansi terkait. Data meliputi keragaan *land tenure*, praktek-praktek penggunaan lahan pada agroforestri, karakteristik sosial ekonomi dan demografi rumah tangga petani, struktur dan peranan organisasi lokal.

Analisis Deskriptif untuk membangun eksplanasi terhadap keragaan dan dinamika penguasaan lahan yang meli-

puti kepemilikan (*ownerships*), pemanfaatan/akses (*use/access*) dan manajemen/kontrol (*management/control*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penguasaan Tanah dan Pohon Dengan Pemanfaatan Agroforestri

Hak-hak penguasaan tanah pada ulayat suku/kaum menunjukkan terbatas dan tidak penuh semua hak-hak tersebut ada, khususnya hak untuk menggadaikan dan menjual tanah. Hal ini disebabkan tanah merupakan kepemilikan komunal

dan bukan kepemilikan pribadi (Tabel 1). Di Sumatera Barat tanah adalah basis bagi komunitas masyarakat Minang kabau, sehingga keberadaannya sendiri berkonotasi dengan keberadaan ulayatnya (suku/kaum) (Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann, 2001). Ketiadaan tanah ulayat secara langsung juga menggerus nilai-nilai eksistensi komunitas yang bersangkutan, sehingga tanah umumnya bukan merupakan kepemilikan pribadi/personal. Tanah merupakan *harato pusako* yang harus dijaga dan dipelihara keberadaannya. Akibatnya hak

Tabel 1. Status penguasaan tanah ulayat kaum/suku di tiga nagari

	Nagari		
	Paru	Koto Malintang	Panninggahan
Pemilikan/ <i>Ownership</i>	Kaum/ suku	Kaum/ suku	Kaum/ suku
Akses/ Pemanfaatan	Pemegang hak atas tanah yang ditunjuk Agroforestri dengan basis tanaman utama adalah karet. Jenis lain seperti kulit manis (<i>Cinnamomum burmani</i>), sawit (<i>Elaeis guineensis</i>), pinang (<i>Areca catechu</i>), meranti (<i>Shorea</i> sp), surian (<i>Toona sureni</i>), jenis pohon buah seperti mangga (<i>Mangifera indica</i>), sawo (<i>Zapota</i> sp), melinjo (<i>Gnetum gnemon</i>), durian (<i>Durio zibethinus</i>), rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>) dan lain sebagainya.	Pemegang hak atas tanah yang ditunjuk Agroforestri berbasis MPTS Jenis durian (<i>Durio zibethinus</i>) Cinnamon (<i>Cinnamomum burmani</i>) Surian (<i>Toona sureni</i>), meranti (<i>Shorea</i> sp) dan bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>), kakao (<i>Theobroma cacao</i>)	Pemegang hak atas tanah yang ditunjuk Agroforestri berbasis tanaman komersial seperti cengkeh (<i>Eugenia aromatica</i>) dan kakao (<i>Theobroma cacao</i>), Jenis lain kelapa (<i>Cocos nucifera</i>), tanaman pangan seperti padi gogo (<i>Oryza</i> sp), ubikayu (<i>Manihot esculenta</i>), jagung (<i>Zea mays</i>), Sayuran seperti kacang (<i>Vigna sinensis</i>), cabe (<i>Capsicum annum</i>), dan cabe rawit (<i>Capsicum frutescens</i>).
Kontrol	Pemegang hak tanah Mamak rumah	Pemegang hak tanah Mamak rumah	Pemegang hak tanah Mamak rumah

yang didapat oleh pemegang tanah hanyalah hak pemanfaatan dan kontrol saja.

Keterbatasan hak-hak perorangan ini sesuai dengan pendapat Otsuka *et al.*, (2001) status jaminan tanah komunal rendah sebab dilihat dari hak-hak yang ada pada tanah terbatas. Otsuka membedakan hak-hak pada tanah komunal ini dengan tanah perorangan (*private*). Di Sumatera Barat walaupun hak-hak ini terbatas namun tanah dapat dikelola tanpa batas waktu. Tanah-tanah kebun atau parak umumnya merupakan milik komunal suku/kaum atau nagari. Tanah dikelola oleh pemegang tanah yang

mendapat hak penguasaan dari garis keturunan ibu (*matrilineal*). Tanah-tanah yang dipegang diwajibkan untuk dikelola sebagai bentuk kepemilikan atas tanah. Sedangkan apabila tanah tidak lagi di kelola atau ditelantarkan maka akan kembali kepada suku/kaum bersangkutan. Sebagai kepemilikan komunal maka tanah dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain melalui gadai atau jual. Hak-hak yang diperbolehkan atas tanah adalah bersifat pemanfaatan sepanjang yang bersangkutan tetap melakukan aktifitas pengelolaan tanah maka hak-haknya secara aman dapat terus diklaim.

Tabel 2. Matrik penguasaan pohon pada tanah *ulayat* kaum/suku di tiga desa (*nagari*)

Nagari	Jenis Pohon	Jenis Hak-hak
Paru	Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>)	Getah dimiliki oleh penanam, batang dan ranting dapat juga dimiliki anggota kaum, dapat dijual bahkan dalam bentuk kebun, penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas
	Kulit manis (<i>Cinnamomum burmanni</i>)	Kulit dimiliki oleh penanam untuk tujuan pendapatan, batang dan ranting juga dapat dimiliki anggota kaum, penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas
	Durian (<i>Durio zibethinus</i>)	Buah dimiliki oleh anggota <i>nagari</i> , sedangkan batang oleh pemilik tanah dan anggota kaum. Memebang memerlukan izin seluruh <i>ninik mamak</i> Paru. Penguasaan hak-hak tersebut dalam waktu yang tidak terbatas
	Banio (<i>Shorea</i> sp) dan meranti (<i>Shorea</i> sp),	Batang dasarnya dimiliki oleh penanam tapi anggota kaum dan <i>nagari</i> dapat memanfaatkan dengan izin pemilik tanah. Izin tebang dari <i>mamak</i> suku
	Durian (<i>Durio zibethinus</i>)	Buah dimiliki oleh pemilik tanah dan anggota <i>nagari</i> dalam sistem <i>balangge</i> , sedangkan batang dimiliki oleh pemilik tanah dan anggota kaum. Izin tebang dari <i>mamak tunganai</i> dan <i>walinagari</i> . Penguasaan tidak terbatas selama umur tanaman
Koto Malintang	Kulit manis (<i>Cinnamomum burmanni</i>)	Penanam dan anggota kaum berhak atas kulit dan batang, sebagai sumber pendapatan. Lama penguasaan seumur tanaman
	Surian (<i>Toona sureni</i>), meranti (<i>Shorea</i> sp) dan bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>)	Hak atas batang pada pemegang tanah dan anggota kaum, begitu pula dengan ranting dan dahan. Tebangan perlu izin dari <i>mamak</i> dan <i>walinagari</i> . Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.
Paringgahan	Cengkeh (<i>Eugenia aromatica</i>), durian (<i>Durio zibethinus</i>), alpukat (<i>Persea americana</i>) dan kakao (<i>Theobroma cacao</i>)	Hak atas buah dan menjual buah dimiliki penanam, tujuan untuk sumber pendapatan, tapi batang dahan dan ranting dapat dimiliki juga oleh anggota kaum. Penguasaan tidak ada batas waktu, selama tanah dikelola
	Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), surian (<i>Toona sureni</i>), jati (<i>Tectona grandis</i>) dan pinus (<i>Pinus</i> sp)	Hak atas batang pada pemegang tanah, tapi pada pohon warisan anggota kaum juga berhak. Hak menjual pada penanam, ranting dan dahan dapat dimiliki anggota kaum. Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.

Status hak-hak penguasaan pohon di tanah ulayat suku/kaum menunjukkan perbedaan berdasarkan kepada jenis pohon (Tabel 2). Di Paru hak-hak penguasaan pada karet dan kulit manis bebas dimiliki oleh pemegang hak tanah. Sedangkan untuk pohon penghasil kayu seperti banio dan meranti, walaupun hak-hak atas batang dimiliki pemegang hak atas tanah, tetapi anggota kaum dapat menggunakan kayu dengan seizin pemegang hak tanah. Begitu juga untuk kepentingan bersama, kayu-kayu yang berasal dari tanah ulayat suku/kaum ini dapat dipergunakan dengan izin pemegang hak atas tanah. Atau terdapat dimensi hak-hak komunal pada produk pohon di atas tanah ulayat suku/kaum ini. Luasnya hak komunal pada jenis pohon ini tampak pada penguasaan pohon durian, dimana buah durian yang jatuh merupakan kepemilikan komunal (anggota nagari). Pemegang hak tanah sebatas pemilik batang, dimana hak menebang mempunyai persyaratan yang berat sebab harus mendapat izin seluruh *ninik-mamak* nagari Paru.

Sedangkan di Koto Malintang pohon di tanah ulayat suku/kaum ini umumnya mempunyai dimensi hak-hak komunal. Pada pohon durian buah dapat dimiliki oleh anggota nagari tetapi terbatas pada selang waktu tertentu. Begitu juga dengan jenis-jenis pohon penghasil kayu dan non-kayu tetap terdapat bagian anggota kaum pada pohon. Namun menebang pohon bukan merupakan halangan di Koto Malintang, sebab di tingkat *rapek ampek jinih*, walinagari menjadi penjamin bagi kayu-kayu yang berasal dari tanah masyarakat ini.

Keleluasaan menikmati hasil tanaman justru dapat dilakukan oleh pemegang hak tanah sepenuhnya di Paninggahan pada tanaman penghasil buah seperti cengkeh (*Eugenia aromatica*), kakao (*Theobroma cacao*), alpukat (*Persea americana*) dan durian (*Durio zibethinus*). Sedangkan pada pohon penghasil kayu pemegang lahan adat dan nagari. Perbedaan antara ketiga nagari berdasarkan kepada adanya ketentuan batasan dan izin tebang yang harus mendapatkan persetujuan kedua institusi tersebut seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Beberapa aturan tebang di tanah ulayat suku/kaum di tiga nagari

Kriteria	Nagari Paru	Koto Malintang	Paninggahan
	Pohon yang ditanam sendiri boleh tebang tanpa izin <i>mamak</i>	Pohon ditebang harus izin <i>Ninik Mamak</i> dan walinagari	Pohon ditebang harus izin <i>mamak</i> dan walinagari
	Pohon ditebang untuk dijual harus izin <i>mamak</i>	Durian tidak boleh ditebang	Hasil tebang dapat dijual
	Izin tidak diperlukan dari walinagari	Aturan tebang pohon tergantung jenis, seperti kelapa dan kulit manis	
	Tidak ada batasan jumlah tebang sepanjang untuk kebutuhan sendiri	Kayu tebang dapat dijual tetapi dibatasi dalam jumlah tebang	
	Tebangan durian memerlukan aturan khusus		

Aturan yang membedakan antar nagari tersebut bersumber dari sistem adat lokal yang merupakan bagian dari sistem *tenure* yang merupakan jaminan terhadap hak-hak komunal. Dalam hal tujuan mendapatkan keuntungan dari sistem *tenure*, di nagari Paru ditunjukkan oleh dominasi pohon karet bertujuan sebagai sumber penghasilan dan motivasi bagi anggota nagari dalam menanam pohon. Sedangkan di Koto Malintang tujuan sebagai sumber penghasilan adalah pada pohon durian dan kulit manis. Sedang di Paninggahan adalah pada berbagai tanaman komersial seperti cengkeh, kakao, dan alpukat. Pilihan-pilihan ini disesuaikan dengan realitas pembatas lingkungan yang bersangkutan.

Perbedaan terhadap hak-hak penguasaan pohon pada tanah ulayat suku/kaum menggambarkan bahwa aturan-aturan atau klaim terhadap hak-hak pada pohon tidak konsisten disebabkan oleh hak-hak pada lahan. Paling tidak ada dua landasan yang membuat perbedaan dalam penguasaan ini, pertama adalah menurunkan derajat ketidakpastian hak-hak dan kedua mengatur akses untuk mendapatkan keuntungan (Hasan, 2000 dan Dorner, 1971).

Berdasarkan hak komunal pada pohon-pohon tertentu menunjukkan walaupun hak-hak lahan pada dasarnya dipegang oleh perorangan tetapi jaminan bagi kepentingan komunal pada pohon juga dapat dilakukan. Hal ini menurut Grigsby (2002) bahwa sistem *tenure* merupakan fenomena dinamis terutama untuk tujuan ekonomi berdasarkan kepada realitas pembatas lingkungan setempat. Pengelolaan sumber daya tradisional bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan bukan sekedar tujuan konservasi saja (Ruttan, 1998). Komunitas yang menggunakan sumber daya untuk kelestariannya harus mampu melakukan keduanya, mampu mencegah

pengguna bebas dan mampu mengimplementasikan strategi pengelolaan yang tepat. Jadi pada dasarnya komunitas adat mempunyai alasan yang kuat dalam menentukan sistem *tenure* tradisional mereka dalam menjaga kelangsungannya. Jika hanya dilakukan pada tujuan ekonomi semata sementara konservasi diabaikan, akan mengubah keseimbangan yang ada. Jadi aturan hak-hak perorangan dan hak-hak komunal pada berbagai jenis pohon yang berbeda adalah upaya dalam menjaga keseimbangan tersebut.

Jaminan Hak-Hak Perorangan atas Tanah Dan Pohon

Jaminan penguasaan (*tenure security*) menurut Bruce (1998) dapat diindikasikan bahwa negara ataupun pribadi yang lain tidak dapat mencampuri pemanfaatan tanah oleh pemilik tanah. Berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang tanah pada ulayat suku/kaum di nagari Paru, Koto Malintang dan Paninggahan, maka tanah dapat ditanami dan ditanami lagi, diwariskan, disewakan, dan diberikan kepada pihak lain dengan pemberitahuan kepada anggota kaum yang lain terutama kepada *mamak* kepala waris. Selain itu hak untuk menggadaikan dan menjual tanah dapat dilakukan berdasarkan kondisi tertentu dan dimusyawarahkan dengan anggota kaum lainnya.

Jaminan penguasaan tersebut ditentukan oleh hak-hak yang ada pada objek penguasaan bersangkutan. Penguasaan bisa saja singkat, misal disewa dalam jangka satu bulan, tetapi penyewa dapat secara pasti menguasai tanah tersebut selama jangka waktu yang disepakati yang menggambarkan keyakinan terhadap sistem legal sehingga tidak ada keraguan terhadap kehilangan haknya. Elemen lain adalah lama waktu penguasaan

(durasi). Jika penguasaan terlalu singkat misal satu tahun maka akan menyulitkan dalam pengembalian investasi yang diberikan ke tanah. Misalnya petani tidak akan menanam pohon karena tidak ada dugaan jaminan untuk menggunakan kayunya nanti. Elemen ketiga adalah persyaratan hak penuh pada tanah. Walaupun tanah dapat dimiliki seumur hidup tetapi tetap tidak aman jika tidak dapat diwariskan atau dijual. Jadi disini dikatakan aman adalah jika hak kepemilikan secara penuh dimiliki.

Berdasarkan kepada hak-hak yang ada ini dan dari indeks jaminan penguasaan tanah menunjukkan bahwa terdapat status jaminan penguasaan yang rendah pada tanah-tanah komunal. Pada standar 6 hak-hak yang diobservasi di atas maka tingkat rata-rata jaminan hak-hak pada tanah tersebut mencapai 2,2-4,7.

Perbedaan rata-rata hak ini pada ketiga nagari membuktikan bahwa aturan yang berlaku pada suatu nagari terhadap klaim hak-hak pada tanah berbeda. Jika diamati pada hak-hak di atas maka umumnya yang tidak dapat atau sulit dilakukan adalah hak menggadaikan dan menjual tanah. Tetapi pada beberapa nagari hal ini masih diperbolehkan asal saja seizin *mamak*. Pada sistem kepemilikan tanah komunal di Sumatera Barat yang berbasis adat walaupun dari indeks menunjukkan nilai yang sedang, tetapi dalam praktiknya tanah sulit untuk dipindahtangankan kepada pihak lain karena umumnya tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Jaminan dalam pemanfaatan bukan halangan bagi pemilik tanah untuk menggarap tanah tersebut, sebab tanah dalam pengakuan adat mempunyai status kepemilikan yang kuat.

Pada tanah ulayat suku/kaum menunjukkan hak pemanfaatan tanah dilakukan oleh pemegang tanah sampai batas waktu yang tidak ditentukan Implikasi-

nya kepada investasi dan upaya-upaya input ke tanah dalam jangka panjang tidak mendapat hambatan dari pihak lain. Hal ini menjadi indikator jaminan penguasaan tanah dimana hak-hak yang klaim oleh pengguna secara perorangan aman. Walaupun pada berbagai teori kepemilikan lainnya menyatakan jaminan ditentukan oleh hak pemindahan tangan (Bruce, 1998; FAO, 2000). Sedangkan hak-hak pemindahtanganan menunjukkan pola yang bervariasi antar nagari, dimana di nagari Paru hak-hak ini masih dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dari anggota kaum yang lain dan dibutuhkan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan di Koto Malintang dan Paninggahan hak-hak memindahtangankan kepada pihak lain ini secara tegas dilarang.

Sedangkan dari indeks jaminan penguasaan pohon menunjukkan bahwa terdapat status jaminan penguasaan yang sedang sampai tinggi pada pohon yang ditanam di tanah komunal suku/kaum. Pada standar 6 hak-hak yang diobservasi di atas maka tingkat rata-rata jaminan hak-hak pada pohon tersebut mencapai 3,45- 5,8 Perbedaan rata-rata hak ini pada ketiga nagari membuktikan bahwa aturan yang berlaku pada suatu nagari terhadap klaim hak-hak pada pohon berbeda. Jika diamati pada hak-hak di atas maka umumnya yang tidak bebas dimiliki adalah hak menebang, menggunakan pohon dan menjual. Tetapi pada beberapa nagari hal ini masih diperbolehkan asal saja seizin *mamak*. Dalam sistem kepemilikan pohon pada tanah komunal di Sumatera Barat yang berbasis adat menunjukkan status jaminan pada dasarnya tinggi, tapi sangat dipengaruhi oleh kepentingan komunal setempat. Sehingga pemanfaatan yang bersifat perorangan perlu mendapatkan persetujuan kelompok adatnya (ketua adat) atau cenderung membatasi kepentingan perorangan yang

tidak sesuai atau tidak mendukung kepentingan komunalnya.

Jika dilihat dari keberadaan status jaminan tanah yang dinilai dari rata-rata hak yang ada pada tanah, menunjukkan bahwa karakteristik kebebasan hak yang terdapat pada tanah tidak menggambarkan rentannya hak-hak pada pemanfaatan tanah. Bahkan pada hak tanah yang rendah menggambarkan hak pemanfaatan tanah justru dalam waktu yang tidak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pada tanah-tanah komunal, rendahnya hak perorangan tidak berarti bahwa jaminan penguasaan pada tanah juga rendah, sebab pada tanah komunal ini selain hak-hak bersifat perorangan juga ada hak-hak komunal. Dimana penataan dalam sistem komunal menjamin penguasaan pada tanah tersebut. FAO (2002) menyebutkan pada penguasaan berbasis komunitas tetap mempunyai jaminan yang kuat walaupun tanpa hak-hak menggadaikan atau menjual dan tidak fair jika jaminan hanya dinilai dari kemampuan mentransfer seperti menggadaikan dan menjual. Walaupun hak ini dilarang pada beberapa nagari, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengakuan secara komunal. Sebab dalam kenyataannya mereka tetap dapat mengelola tanah dengan tenang dan mendapatkan sumber pangan darinya. Hal ini lebih menunjukkan kepada karakteristik sistem penguasaan dengan kepemilikan komunal umumnya yang berlaku di Sumatera Barat.

Gambaran ini berbeda dengan pemaknaan *land tenure* Barat, bahwa hak-hak perorangan yang ada pada tanah adalah gambaran utama jaminan penguasaan tanah. Menurut Bruce (1998) jaminan penguasaan hanya kuat jika terdapat hak penuh pada tanah yaitu jika tanah dapat diwariskan atau dijual. Tanah bahkan tidak aman walaupun dapat dimiliki seumur hidup tetapi kedua hak di atas tidak ada. Hal ini sangat jelas menunjukkan

jaminan lebih dinilai dari hak-hak perorangan. Kekuatan hak-hak ini mensyaratkan bahwa pemilik dapat menggunakan hak-hak tersebut secara bebas tanpa ada larangan atau persyaratan lain, sebab konsep legal dalam kepemilikan ini adalah bahwa hak-hak pada sumber daya ini bebas digunakan dan dilindungi dari campur tangan orang lain (Cooter dan Ulen, 1988). Jadi kepemilikan membuat zona *privacy* dimana pemilik menggunakan hak-haknya tanpa perlu menjawab keberatan dari orang lain (Nicita *et al.*, 2005). Dengan alasan itu pula Otsuka *et al.*, (2001) menyatakan dari hasil penelitiannya di empat lokasi Sumatera bahwa tanah dengan status kepemilikan komunal (*lineage land*) dan kepemilikan bersama beberapa keluarga mempunyai status jaminan hak-hak yang lemah.

Menurut pendapat Place dan Otsuka (1997) dimana jika kepemilikan pribadi tidak pasti dan tidak jelas maka insentif pada tanah dan pohon akan terhambat. Selain itu juga jaminan penguasaan berefek positif pada investasi yang memacu lebih produktif dan pemanfaatan tanah lebih *sustainable*. Hal ini agak berbeda dengan di Sumatera Barat. Walaupun tanah berstatus kepemilikan komunal, tetapi akses pada tanah tidak sama untuk semua anggota komunal. Akses pada tanah diberikan kepada anggota komunal yang telah ditunjuk untuk mengusahakan tanah tersebut. Sedang hak-hak komunal pada anggota yang lain terbatas. Jadi kondisi ini berimplikasi terhadap pengelolaan tanah (*management*) dan bukan pada pemilikan (*ownership*) tanah, akibatnya hak-hak perorangan pada tanah yang menjadi prasyarat untuk investasi ke tanah bukan ukuran bagi pemegang tanah untuk tujuan tersebut. Interest terhadap penguasaan pohon itu sendiri yang mendorong investasi dalam bentuk pohon ke tanah.

Di lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa pada tanah komunal walaupun hak-hak secara perorangan rendah jika dilihat dari status hak-hak tersebut, tetapi dijamin dalam sistem komunal. Pada nagari Paru dimana tanah dalam kondisi tertentu dapat dipindah tangankan, tetapi mempunyai persyaratan yang unik sedemikian sehingga tanah sebenarnya hanya berputar saja kepemilikan dalam masyarakat nagari Paru. Menurut Lynch (2002), sistem kepemilikan yang digambarkan pada basis komunal seperti di atas tidak tepat dilakukan pada kasus disini. Konsep dimana kepemilikan, hak milik dan sistem sewa untuk menggambarkan konsep Barat yang telah ketinggalan dalam menggambarkan praktik penguasaan berbasis komunitas.

Jika dilihat dari keberadaan status jaminan tanah yang dinilai dari rata-rata hak yang ada pada tanah, menunjukkan bahwa karakteristik kebebasan hak yang terdapat pada tanah tidak menggambarkan terbatasnya hak-hak pada pohon. Bahkan pada hak tanah yang rendah menggambarkan hak pada pohon dan vegetasi di atasnya justru kuat. Hal ini menggambarkan bahwa pada tanah-tanah komunal disini, rendahnya hak perorangan tidaklah mengartikan bahwa jaminan penguasaan pada pohon rendah, sebab pada tanah komunal ini selain ada hak-hak bersifat perorangan juga ada hak-hak komunal. Dimana penataan dalam sistem komunal menjamin penguasaan pada tanah tersebut

Dari sini menunjukkan bahwa walaupun tanah pada dasarnya bukan kepemilikan perorangan tetapi hak-hak yang dimiliki pada tanah cukup leluasa untuk didapatkan. Tanah dapat terus dikelola seumur hidup oleh pemegang tanah serta dapat mewariskan kepada keturunannya (garis ibu) oleh sebab itu jaminan penguasaan tanah dalam jangka

panjang dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan karakter yang berbeda dengan hak penguasaan tanah menurut teori yang ada selama ini bahwa pada tanah komunal maka hak jaminan penguasaannya lemah (Place *et al.*, 2004; Quisumbing *et al.*, 1999; Mwakubo, 2002).

Implikasi Penguasaan Pada Pengelolaan Agroforestri

Pola pemilihan bentuk agroforestri

Penguasaan tanah dan pohon di atas menunjukkan bahwa pada tanah walaupun hak-hak terbatas tetapi aman untuk dilakukan (*enforceable*). Akibatnya status tanah ini bukan hambatan bagi petani pemegang tanah untuk investasi ke tanah. Sedangkan hak-hak pada pohon diketahui tinggi, bahkan hampir semua hak-hak tersebut ada, tetapi tingginya hak-hak perorangan ini dibatasi oleh hak-hak komunal. Akibatnya petani pemegang tanah tidak leluasa atau tidak bebas mendapatkan keuntungan dari pohon. Solusi sederhana adalah petani akan menghindari menanam pohon.

Menanam pohon pada agroforestri di tiga nagari ini adalah juga merupakan kepentingan komunal untuk menjaga kelestarian sumber daya mereka sekaligus juga menjadi sumber pendapatan. Oleh sebab itu pilihan kepada bentuk agroforestri sebagai pola pemanfaatan tanah tidak diganti dengan pola-pola pertanian monokultur, hanya saja terdapat kecenderungan terjadi reduksi agroforestri ke arah pilihan-pilihan tanaman berkayu yang cepat berproduksi. Dilihat dari ketiga nagari tersebut membuktikan hal ini, dimana jenis-jenis seperti karet (*Hevea brasiliensis*), kakao (*Theobroma cacao*), dan cengkeh (*Eugenia aromatica*) mendominasi pada tanah ulayat suku/kaum di ketiga nagari.

Menurut McDicken dan Vergera (1990) keberlanjutan agroforestri ditentukan oleh karakter pohon. Dengan pemilihan jenis pohon kepada kelas ketinggian tajuk menengah maka agroforestri yang terbentuk cenderung untuk terjadi degradasi. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh nagari Koto Malintang, pada tanah ulayat suku/kaum dan nagari, agroforestri didominasi oleh pohon berkayu multi guna yang mendominasi lapisan tajuk bagian atas. Dimana kepemilikan tanah komunal telah memapankan pertumbuhan pohon selama puluhan tahun. Pola agroforestri yang menyerupai hutan alam dengan dominasi Durian (*Durio zibethinus*) sebagai pohon utama serta jenis-jenis pohon multi guna merupakan pendekatan terhadap kearifan lokal dimana pohon berfungsi menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai pendekatan terhadap pola manajemen tanah dan tanaman sesuai dengan pembatas lokal.

Agroforestri yang ditanam di lereng-lereng perbukitan merupakan areal yang mudah longsor sehingga tanaman pohon merupakan pilihan yang tepat sebagai upaya konservasi dan sumber pendapatan. Selain itu areal agroforestri yang berbatasan langsung dengan hutan lindung mendapat ancaman musuh-musuh tanaman yang berasal dari hutan sehingga pendekatan budidaya seperti ini meminimalkan resiko kerusakan.

Pola agroforestri seperti ini disebabkan oleh keberadaan hak-hak komunal yang kuat pada pohon dalam aturan kelembagaan yang membatasi hak-hak perorangan untuk menggunakan pohon sebebaskan-bebasnya. Aturan menebang dan memanfaatkan pohon merupakan pembatas bagi perorangan untuk memperhitungkan kepentingan komunal. Keterbatasan hak-hak menggunakan pohon secara perorangan di satu sisi dengan kepentingan komunal di sisi lain menjadikan

agroforestri di Koto Malintang tetap lestari. Di sini terdapat harmoni antara kepentingan perorangan dan komunal yang berakibat agroforestri terjaga kelestariannya.

Menurut Meinzen-Dick dan Esther Mwangi (2008) hak-hak kepemilikan pada sumber daya milik bersama seperti sebuah jaringan kepentingan. Kepentingan suatu kelompok berkaitan dengan kepentingan kelompok atau orang lain. Akibatnya seseorang akan dibatasi dalam menggunakan tanah maupun pohon secara berlebihan yang dapat merugikan kelompok atau orang lain, hal ini dapat saling mempertahankan kelestarian sumber daya.

Input Manajemen Agroforestri

Berdasarkan keterbatasan hak-hak perorangan pada tanah dan pohon sebagai akibat dikotomi antara hak-hak perorangan dengan komunal mengarahkan agroforestri kepada tiga tipe, yaitu agroforestri berbasis kebun karet (*Rubber based agroforestry*) di Paru, agroforestri kompleks (*MPTs agroforestry*) di Koto Malintang dan agroforestri berbasis tanaman komersial. Tipe-tipe ini juga berdampak terhadap input manajemen (pengelolaan) agroforestri. Pengelolaan agroforestri ini dapat dilihat pada Tabel 5.22 pengelolaan agroforestri di nagari Paru, di nagari Koto Malintang pada Tabel 5.25, dan di nagari Paninggahan Tabel 5.28.

Pengelolaan ini menunjukkan pada jenis tanaman pohon umumnya dikelola dengan cara semi tradisional, dimana pembibitan dibuat sendiri dan umumnya tanpa pupuk kimia. Kegiatan pemeliharaan umumnya hanya berupa tebasan pembebasan yang dilakukan dengan intensitas 3-4 kali setahun. Pengelolaan pohon seperti ini dilakukan di nagari Paru dan Koto Malintang. Sedang-

kan di Paninggahan pengelolaan tanaman relatif lebih intensif dari mulai pembibitan, pemupukan dan pemeliharaan. Disini nampak bahwa pada tanaman komersial pengelolaan dilakukan lebih intensif dibandingkan dengan tanaman pohon seperti di Paru dan Koto Malintang. Jadi pilihan menanam pohon selain berfungsi kepentingan komunal juga meminimalkan input-input ke tanah.

Pilihan manajemen tradisional yang diterapkan pada agroforestri berbasis pohon adalah sebagai akumulasi dari hak-hak perorangan dan komunal. Disini dibuktikan kelestarian agroforestri yang telah ada di Koto Malintang dan di Paru. Sesuai pendapat Farrington dan Boyd (1997) bahwa manajemen tradisional tidak memicu degradasi akhir. Di sini manajemen tradisional merupakan pendekatan harmoni antar dikotomi dan kontradiksi hak-hak kepemilikan pada sumber daya komunal.

Menurut Lynch (2002) pada tanah komunal secara spesifik mempunyai pengaturan sendiri yang dapat berbeda dengan komunal yang lain. Di sini keterbatasan hak-hak perorangan bukan hambatan dalam pemanfaatan, sebab tanah dapat dikuasai seumur hidup bahkan tanah dapat diwariskan kepada keturunan menurut garis ibu (*matrilineal*). Dengan demikian input ketanah (investasi) tidak dibatasi oleh status tanah komunal dengan tingkat jaminan rendah, atau dengan kata lain status penguasaan tanah komunal bukan menjadi pembatas dalam menanam pohon.

Pola penguasaan pohon secara umum di suatu nagari dapat dipandang sebagai suatu bentuk aturan kelembagaan secara lebih jauh menentukan pengelolaan pohon termasuk penanaman. Dalam term tanah komunal ini di Sumatera Barat, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang tanah tetap harus dikomunikasikan dengan pihak lain dalam hal

ini *mamak* rumah. Hak-hak ini dalam aplikasinya tidak berdiri sendiri sebab terikat juga dengan keberadaan pemegang tanah sebagai anggota komunal (kaum). Hal mana dapat dipahami sebab menurut Ramli Zein (1995) dalam masyarakat adat minangkabau hak-hak perorangan bukan pembentuk dari hak-hak masyarakat, tetapi hak perorangan di berikan justru berhubungan dengan tugas dan fungsinya di dalam masyarakat. Dalam hal ini hak-hak yang dipunyai oleh pemegang tanah adalah merupakan operasional darinya sebagai anggota suku/kaum. Oleh sebab itu hak-hak pada tanah komunal ini tidak dapat diberikan kepada yang bukan anggota suku/kaum.

Sebaliknya di wilayah penelitian menunjukkan hak-hak penguasaan pada tanah di Sumatera Barat merupakan hal yang jelas dan aman, sehingga kelembagaan penguasaan tanah secara adat tidak menjadi hambatan dalam investasi ke tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ostrom (1999), Wade (1987) dan Agrawal (2001) bahwa pada sumber daya milik bersama dalam kondisi tertentu mampu membuat penataan sendiri yang menjamin kelangsungan sumber daya tersebut. Pengaturan adat di sini sebagai suatu sistem komunal dimana tanah dinyatakan milik komunal, justru menjadi dasar bagi hak-hak penguasaan tanah bagi pemegang tanah. Dalam kondisi ini berarti hak-hak penguasaan tanah jelas dan pasti, hambatan investasi tidak disebabkan karena lemahnya hak-hak pada tanah, justru akibat kontradiksi kepentingan perorangan dan komunal.

KESIMPULAN

Hak-hak penguasaan tanah terbatas tetapi penguasaan tetap aman. Sedangkan penguasaan pohon menunjukkan status jaminan penguasaan tinggi tetapi terbatas,

1. dalam arti hak-hak perorangan tidak mutlak sepenuhnya pada pohon tapi dibatasi oleh kepentingan komunal.
2. Sebagai menjadi sumber pendapatan pilihan agroforestri sebagai pola pemanfaatan tanah tidak diganti dengan pola-pola pertanian monokultur, terdapat kecenderungan reduksi agroforestri ke arah pilihan-pilihan tanaman berkayu yang cepat berproduksi.
3. Pengelolaan pohon umumnya dengan cara semi tradisional, dimana input dilakukan terbatas (bibit sendiri dan umumnya tanpa pupuk). Kegiatan pemeliharaan pada tanaman komersial dilakukan lebih intensif dibandingkan dengan tanaman pohon.
4. Pilihan manajemen tradisional yang diterapkan pada agroforestri berbasis pohon adalah merupakan pendekatan harmoni antar dikotomi dan kontradiksi hak-hak kepemilikan pada sumber daya komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. 2001. Common Property Institution and Sustainable Governance of Resources. *World Development* Vol. 29 (10) : 1649-1672.
- Benda-Beckmann, F. dan K. Benda-Beckmann. 2001. Jaminan Sosial, Sumber daya Alam dan Kompleksitas Hukum. Dalam Benda-Beckman, F., K. Von Benda-Beckmann, dan Julietta Koning (Ed). *Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Bruce, J.W. 1998. *Review of Tenure Terminology*. Tenure Brief-Land Tenure Center No.1 University of Wisconsin, Madison.
- Dorner, P. 1971. Land Tenure Institutions. In Blase (Ed). 1971. *Institutions in Agricultural Development*. The Iowa State University Press, Ames Iowa 14-40
- FAO, 2000. *Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure*. FAO Corporate Document Repository.
- FAO, 2002. *Land Tenure and Rural Development*. FAO Land Tenure Studies. FAO.
- Farrington, J and C. Boyd. 1997. Scaling up the Participatory Management of Common Pool Resources. *Development Policy Review* Vol. 15 : 371-391
- Grigsby, W.J. 2002. Subsistence and land tenure in the Sahel. *Agriculture and human Values* 19 : 151-164.
- Hasan, L. 2000. Analysing Institutional Set-Up of Forest Management in Pakistan. *Research report* No. 182. Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad.
- MacDicken and Vergera. 1990. *The Clasification of Agroforestri*. In MacDicken dan N.T. Vergera (eds). 1990. *Agroforestry: Classification and Management*. Jhon Wiley and Sons, N.Y.

- Meinzen-Dick, Ruth dan Esther Mwangi. 2008. Cutting The Web of Interest: Pitfalls of Formalizing Property Right. *Land Use Policy* 26 : 36-43.
- Mwakobo, S.M. 2002. Land Tenure and Farm Level Soil Conservation in Semiarid Areas, Kenya. *Paper in Int.Association of Common Property Research*, Zimbabwe
- Nicita, A., M. Rizzolli dan M.A. Rossi. 2005. *Towards a Theory of Incomplete Property Rights*. ISNIE Conference. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
- Otsuka, K., S. Suyanto, T. Sonobe dan T.P.Tomich. 2001. Evolution of Land Tenure Ostrom, E. 1999. *Self-Governance and Forest Resources*. Center for International Forestry Research (CIFOR) No. 20:1-11
- Place, F., K.Otsuka dan S. Scherr. 2004. *Collective Action and Property Right for Sustainable Development. Property Right, Collective Action and Agroforestry*. Focus 11 Brief 5 of 16 Februari 2004. Int.Food Policy Research Institute.
- Place, F dan K. Otsuka. 1997. *Population Pressure, Land Tenure and Tree Resource Management in Uganda*. EPTD Discussion Paper No. 24. Int. Food Policy Research Int.
- Quisumbing, A.R., E.Payongayong, J.B.Aido dan K. Otsuka. 1999. Womens Land Right in The Transition to Individualized ownership: Implications for the management of Tree Research in Western Ghana. *FCND Discussion Paper* No. 58 Int. Food Policy Research Inst. www.ifpri.org
- Ramli Zein. 1995. *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Ruttan, L.M. 1998. Closing the Commons: Cooperation for Gain or Restraint?. *Human Ecology*, Vol. 26 (1).
- Syahyuti. 2006. Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 24 (1) : 14-17
- Wade, R. 1987. The Management of Common Property Resources: Finding a Cooperative Solution: *The World Bank Research Observer*, Vol. 2, No. 2 (Jul., 1987), pp. 219-234